

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Overconfidence Chief Executive Officer*: Apakah Berpengaruh terhadap *Tax avoidance*? Evidence in Indonesia

Nabila^{1*}, Diarany Sucahyati²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

* E-mail: akunabilanadan@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 05-06-2026

Revision: 28-06-2026

Published: 28-07-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1508

ABSTRACT

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi persoalan penting di Indonesia karena *tax ratio* yang relatif rendah, sementara perusahaan terus mencari cara legal untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan celah peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, CEO *overconfidence* dan *tax avoidance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Penghindaran pajak diproksikan dengan GAAP *effective tax rate* (GAAP_ETR), pengungkapan CSR diukur menggunakan indeks berbasis Global Reporting Initiative (GRI), dan CEO *overconfidence* diukur dengan variabel dummy berbasis belanja modal terhadap median industri. Dengan teknik *purposive sampling* diperoleh 1.409 observasi kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda (*Ordinary Least Squares*) dengan robust standard error pada tingkat perusahaan serta efek tetap industri dan tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, sejalan dengan teori legitimasi yang memposisikan CSR sebagai "modal moral" atau instrumen lindung nilai reputasi. Sebaliknya, CEO *overconfidence* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang dijelaskan oleh sistem tata kelola dua tingkat (*two-tier governance system*) di Indonesia sehingga keputusan strategis diambil secara kolektif dan membatasi bias psikologis CEO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku fiskal perusahaan lebih ditentukan oleh strategi legitimasi melalui pengungkapan CSR dibandingkan karakteristik psikologis pemimpin puncak, sehingga otoritas pajak perlu mencermati perusahaan dengan pengungkapan CSR tinggi sebagai indikasi potensi penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*; CEO *Overconfidence*; *Tax avoidance*; Legitimacy Theory

ABSTRACT

Tax avoidance is an important issue in Indonesia due to its relatively low tax ratio, while firms continue to seek legal means of minimizing their tax burden by exploiting regulatory loopholes. This study want to explain about Corporate Social Responsibility disclosure, CEO overconfidence and avoidance among non-financial firms listed on the BEI during 2020 – 2024. Tax avoidance is proxied

Acknowledgment

by the GAAP effective tax rate (GAAP_ETR), CSR disclosure is measured using a Global Reporting Initiative (GRI)-based index, and CEO overconfidence is measured with a capital expenditure based dummy variable relative to the industry median. Using purposive sampling, 1,409 observations were analyzed through multiple linear regression (Ordinary Least Squares) with firm-level robust standard errors and industry and year fixed effects. The results show that CSR disclosure has a significant effect on tax avoidance, in which higher CSR disclosure is associated with higher tax avoidance, consistent with legitimacy theory which positions CSR as "moral capital" or a reputational hedging instrument. In contrast, CEO overconfidence has no significant effect on tax avoidance, explained by Indonesia's two-tier governance system, in which strategic decisions are made collectively and thus constrain CEO psychological bias. This study concludes that corporate fiscal behavior is more strongly determined by legitimacy strategies through CSR disclosure than by the psychological characteristics of top leaders, implying that tax authorities should scrutinize firms with high CSR disclosure as a potential indicator of tax avoidance.

Key word: Corporate Social Responsibility; CEO Overconfidence; Tax avoidance; Legitimacy Theory

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian dalam kajian akuntansi dan perpajakan di Indonesia, mengingat perannya yang strategis dalam menentukan kapasitas fiskal negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun realisasi penerimaannya masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI (2024), tax ratio Indonesia sepanjang periode 2020 – 2024 tergolong rendah, bergerak dari 8,33% pada 2020, meningkat menjadi 10,38% pada 2022, kemudian menurun kembali menjadi sekitar 10,08% pada 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun penerimaan pajak secara nominal meningkat, kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) belum optimal. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak badan. *Tax avoidance* dipahami sebagai upaya legal untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah aturan (loopholes) tanpa melanggar ketentuan hukum positif (Afriyani & Karina, 2024; Rogers-Glabush, 2015). Meskipun sah secara hukum, praktik ini tetap menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan yang berupaya menekan beban pajak dan pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan negara (Arliansyah dkk., 2023).

Salah satu determinan yang banyak dikaji dalam literatur adalah pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility (CSR). CSR pada awalnya diperkenalkan sebagai konsep tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat oleh Bowen (1953), yang kemudian dikembangkan melalui Carroll's Pyramid of CSR menjadi empat tingkatan tanggung jawab, meliputi aspek ekonomi, hukum, etika, dan filantropi (Carroll, 1991). Dalam perkembangannya, CSR tidak lagi dimaknai sekadar tuntutan moral, melainkan telah menjadi elemen yang menyatu dengan strategi bisnis dan keberlanjutan perusahaan (Kurnikova & Sucahyati, 2026). Di Indonesia, pelaksanaan CSR bahkan diwajibkan bagi kategori perusahaan tertentu melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan tingginya komitmen sosial perusahaan, di mana hingga 2024 sebanyak 873 perusahaan tercatat atau setara 97 persen telah menyampaikan laporan keberlanjutan (News Antara, 2025). Namun, tingginya komitmen sosial ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah komitmen tersebut sejalan dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara.

Berbagai penelitian terdahulu telah menguji hubungan antara CSR dan penghindaran pajak, namun temuannya masih menunjukkan inkonsistensi. Sebagian studi menemukan bahwa CSR berkorrelasi positif dengan *tax avoidance*, di mana aktivitas CSR dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi maupun manajemen risiko untuk menutupi dampak negatif praktik pajak agresif (Karavitis dkk., 2025; Wulandari & Fanani, 2024; Retnoningsih dkk., 2024). Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan perilaku fiskal melalui kerangka teori legitimasi, namun memiliki kelemahan karena hasilnya sangat bergantung pada konteks institusional. Sebaliknya, Hajawiyah dkk. (2022) menemukan hubungan negatif dua arah antara CSR dan agresivitas pajak, yang mencerminkan peran CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang substantif. Sementara itu, Montenegro (2021) dalam studi lintas negara menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh langsung terhadap tax evasion, melainkan bergantung pada kualitas tata kelola nasional. Nerantzidis dkk. (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pengaruh CSR terhadap praktik pajak bersifat kontekstual dan bergantung pada lingkungan institusional. Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengungkapan CSR semata, melainkan juga oleh faktor lain yang melekat pada perusahaan, khususnya karakteristik pengambil keputusan puncaknya.

Faktor lain yang relevan adalah karakteristik psikologis pemimpin puncak, sebagaimana dijelaskan melalui *upper echelon theory* yang dikembangkan Hambrick dan Mason (1984). Teori ini menyatakan bahwa perilaku dan keputusan strategis organisasi mencerminkan karakteristik personal para eksekutif puncaknya (Hambrick, 2007). Salah satu karakteristik yang relevan adalah CEO *overconfidence*, yaitu kecenderungan seorang pemimpin untuk menaksir terlalu tinggi kemampuan dirinya, melebih-lebihkan ketepatan penilaiannya, serta memiliki keyakinan berlebihan terhadap hasil keputusannya (Moore & Healy, 2008). CEO yang *overconfidence* cenderung memandang situasi beri-

siko sebagai peluang yang dapat dikelola dan lebih berani mengambil kebijakan agresif, termasuk dalam perpajakan (Hsieh dkk., 2018). Studi Sutrisno dkk. (2022) dan Souguir dkk. (2024) menemukan bahwa CEO *overconfidence* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, pendekatan berbasis karakteristik CEO ini juga memiliki keterbatasan, sebagaimana ditunjukkan Carrer dan Slavov (2021) yang justru tidak menemukan hubungan signifikan antara *overconfidence* CEO dan agresivitas pajak. Perbedaan ini menegaskan bahwa pengaruh karakteristik CEO terhadap perilaku fiskal masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, terdapat GAP penelitian yang perlu diisi. Pertama, penelitian yang menguji pengaruh CEO *overconfidence* terhadap *tax avoidance* secara bersamaan dengan pengungkapan CSR masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks pasar modal Indonesia. Karavitis dkk. (2025) memang telah menguji peran keduanya, namun penelitiannya dilakukan pada perusahaan di Tiongkok yang memiliki sistem kepemilikan negara, tata kelola korporat, dan lingkungan institusional yang berbeda secara signifikan dengan Indonesia. Kedua, Kharisma Putri (2026) yang meneliti konteks Indonesia hanya terbatas pada sektor non-cyclical consumer goods periode 2022–2024, sehingga generalisabilitasnya terhadap seluruh sektor industri masih belum dapat dipastikan. Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan pokok, yaitu apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan apakah CEO *overconfidence* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Untuk membuktikan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yang menempatkan pengungkapan CSR dan CEO *overconfidence* sebagai dua determinan yang diuji secara simultan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024. *Tax avoidance* diproksikan dengan GAAP *effective tax rate* (GAAP_ETR) yang mampu menggambarkan praktik penghindaran pajak secara komprehensif, baik dari selisih temporer maupun permanen (Hidayatulloh dkk., 2024). Pengungkapan CSR diukur menggunakan indeks berbasis Global Reporting Initiative (Soysa dkk., 2024), sedangkan CEO *overconfidence* diukur melalui proksi belanja modal terhadap median industri (Listiani dkk., 2024; Duellman dkk., 2015). Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan robust standard error serta efek tetap industri dan tahun terhadap 1.409 observasi yang diperoleh melalui purposive sampling.

Dalam penelitian ini, ada hal baru yang diuji. Pertama, dari sisi cakupan, penelitian ini menggunakan populasi yang lebih luas berupa seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya yang terbatas pada sektor tertentu. Kedua, dari sisi periode, rentang 2020 – 2024 dipilih karena mencakup kondisi ekonomi yang beragam, sehingga memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai dinamika perilaku fiskal dalam berbagai siklus bisnis. Ketiga, dari sisi kebaruan konseptual, dengan

menempatkan pengungkapan CSR dan CEO *overconfidence* sebagai dua determinan yang diuji secara bersamaan, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi literatur akuntansi mengenai determinan penghindaran pajak perusahaan, sekaligus menjembatani perspektif teori legitimasi dan upper echelon theory.

Adapun susunan artikel ini disusun sebagai berikut: Pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, dan kontribusi penelitian. Bagian kedua menyajikan tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga menguraikan metode penelitian, meliputi jenis dan objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik penentuan sampel, serta teknik analisis data. Bagian keempat memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, dan bagian kelima menutup dengan kesimpulan, keterbatasan, serta saran bagi penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memanfaatkan data numerik untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan (Mukhid, 2021). Objek penelitian terdiri dari satu *tax avoidance* sebagai variable independen, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan CEO *overconfidence* sebagai variabel independen. Subjek penelitian adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 – 2024. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata 17. Secara keseluruhan, tahapan penelitian dijalankan secara berurutan sebagaimana diuraikan pada subbab berikut.

Populasi dalam penelitian ini mencakup Perusahaan non keuangan yang ada di BEI sepanjang periode 2020 – 2024, dengan total populasi sejumlah 4.745 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan di tujuan penelitian (Sugiyono, 2023).

Proses eliminasi sampel dilakukan menggunakan Stata 17 guna meminimalkan potensi kesalahan manual (*human error*). Perusahaan sektor keuangan dikeluarkan karena memiliki karakteristik laporan keuangan, struktur permodalan, dan regulasi yang berbeda dibandingkan sektor non-keuangan. Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh 1.409 observasi sebagai sampel akhir penelitian.

Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan situs resmi perusahaan, serta didukung sumber sekunder lain seperti Yahoo Finance dan Kaggle. Sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi (Sugiyono, 2023). Pengumpulan data ditempuh melalui dua prosedur, yaitu survei pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan melalui penelusuran jurnal, peraturan perundang-

undangan, dan artikel relevan, serta dokumentasi untuk mengunduh data penelitian dari sumber kredibel seperti BEI dan situs resmi perusahaan.

Variabel Kontrol

Untuk mengendalikan faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, penelitian ini menggunakan dua belas variabel kontrol, yaitu:

1. *Return on Assets* (ROA), diukur dari rasio laba bersih terhadap total aset;
2. Ukuran perusahaan (SIZE), diukur dari logaritma natural total aset;
3. *Leverage* (LEV), diukur dari rasio total utang terhadap total aset;
4. Kas (CASH), diukur dari rasio kas dan setara kas terhadap total aset;
5. Aset tetap (PPE), diukur dari rasio aset tetap bersih terhadap total aset;
6. *Market to Book Ratio* (MB), diukur dari rasio nilai pasar terhadap nilai buku ekuitas;
7. Pertumbuhan perusahaan (GROWTH), diukur dari pertumbuhan penjualan;
8. Usia CEO (CEOAGE), diukur dari usia CEO pada tahun pengamatan;
9. Masa jabatan CEO (CEOTENURE), diukur dari lama menjabat dalam tahun;
10. CEO founder (CEOFOUNDER), variabel dummy bernilai 1 jika CEO merupakan pendiri;
11. Gender CEO (CEOGENDER), variabel dummy bernilai 1 jika CEO laki-laki;
12. Usia perusahaan (FAGE), diukur dari lama perusahaan berdiri dalam tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah data sekunder, diolah menggunakan perangkat lunak Stata 17. Data bersumber dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2024, dengan dukungan basis data Yahoo Finance dan Kaggle. Berdasarkan proses seleksi purposive sampling, diperoleh 1.409 observasi yang tersebar pada sembilan sektor industri. Sebaran sampel tiap sektor disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Sampel Tiap Sektor

Sektor	Freq.	Percent	Cum.
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	74	5,25%	5,25%
Pertambangan & Konstruksi	232	16,47%	21,72%
Manufaktur 1 (Non-Durable Goods)	321	22,78%	44,50%
Manufaktur 2 (Durable Goods)	151	10,72%	55,22%
Transportasi, Komunikasi, Utilitas	234	16,61%	71,82%
Perdagangan Grosir & Eceran	166	11,78%	83,61%
Real Estate	46	3,26%	86,87%
Jasa 1 (Bisnis, Perhotelan, & Hiburan)	140	9,94%	96,81%
Jasa 2 (Kesehatan, Teknik, & ...)	45	3,19%	100,00%

Sektor	Freq.	Percent	Cum.
Manajemen)			
Total	1.409	100,00%	

Sumber: data diolah (2026)

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Memuat informasi sebagai berikut: variabel dependen GAAP_ETR memiliki nilai rata-rata sebesar -0,168, yang berarti secara rata-rata tarif pajak efektif perusahaan dalam sampel bernilai negatif, dengan standar deviasi 0,274 yang menunjukkan variasi tinggi antar perusahaan. Variabel CSRD memiliki rata-rata 0,499, yang berarti perusahaan dalam sampel rata-rata mengungkapkan 49,9% dari total item indeks GRI. Variabel OC memiliki rata-rata 0,486, menunjukkan bahwa 48,6% perusahaan dalam sampel memiliki CEO yang terindikasi *overconfidence*, sehingga distribusi antara perusahaan yang memiliki CEO *overconfidence* dan tidak hampir seimbang.

Pada variabel kontrol, ROA memiliki rata-rata 4,060 dengan variasi tinggi (standar deviasi 9,674), sedangkan SIZE rata-rata 22,301 yang setara dengan total aset sekitar Rp4,8 triliun. Rata-rata CEOAGE sebesar 55,862 tahun menunjukkan bahwa CEO perusahaan sampel umumnya berusia sekitar 56 tahun, dan CEOGENDER sebesar 0,935 menunjukkan dominasi CEO laki-laki (93,5%). Rata-rata CEOFOUNDER sebesar 0,090 menunjukkan hanya 9% perusahaan yang dipimpin oleh CEO sekaligus pendiri, sementara FAGE rata-rata 33,961 tahun menunjukkan perusahaan sampel telah beroperasi rata-rata sekitar 34 tahun.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Dev
GAAP_ETR	-0,168	-0,201	-1,261	1,162	0,274
CSRD	0,499	0,465	0,144	0,969	0,200
OC	0,486	0,000	0,000	1,000	0,500
ROA	4,060	3,930	-32,490	34,890	9,674
SIZE	22,301	22,208	18,448	25,857	1,591
LEVERAGE	0,486	0,443	0,040	2,292	0,337
CASH	0,140	0,099	0,002	0,641	0,134
PPE	0,567	0,587	0,083	0,951	0,226
MB	2,466	1,140	-2,235	33,411	4,557
GROWTH	0,004	-0,035	-0,743	2,020	0,373
CEOAGE	55,862	56,000	27,000	85,000	9,477
CEOFOUNDE R	0,090	0,000	0,000	1,000	0,286
CEOTENURE	6,815	4,000	0,000	53,000	8,281
CEOGENDER	0,935	1,000	0,000	1,000	0,247
FAGE	33,961	32,000	2,000	113,000	16,962

Sumber: data diolah (2026)

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melalui Variance Inflation Factor (VIF) dan tol-eransi (1/VIF). Hasil menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai VIF di bawah 10, dengan VIF tertinggi pada variabel CASH sebesar 1,50 dan rata-rata VIF keseluruhan sebesar 1,26. Dengan demikian, model penelitian bebas dari gejala multikolinearitas.

Kemudian, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch-Pagan, dengan hasil disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, nilai Prob > chi2 sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan disimpulkan model mengalami heteroskedastisitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan estimasi robust standard error pada tingkat perusahaan.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroksedastisitas

H0	Chi-square (χ^2)	Prob > chi2	Keputusan	Kesimpulan
Constant variance	200,80	0,0000	H0 ditolak	Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: data diolah (2026)

Hasil Analisis Regresi

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda (OLS) dengan robust standard error, efek tetap industri, dan efek tetap tahun. Hasil regresi disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, CSR memiliki koefisien -0,089 dan signifikan pada tingkat 5% ($t = -2,16$), sehingga H1 diterima. Sebaliknya, OC memiliki koefisien -0,005 dan tidak signifikan ($t = -0,35$), sehingga H2 ditolak. Di antara variabel kontrol, ROA berpengaruh negatif signifikan pada tingkat 1%, sementara LEV berpengaruh positif signifikan pada tingkat 10%. Nilai R^2 sebesar 0,062 menunjukkan bahwa variabel independen dan kontrol menjelaskan 6,2% variasi penghindaran pajak.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t-statistik
CSR	-0,089**	(-2,16)
OC (DUMMYCAPEX)	-0,005	(-0,35)
ROA	-0,003***	(-4,18)
SIZE	-0,005	(-0,86)
LEV	0,069*	(1,87)
CASH	0,085	(1,27)
PPE	0,057	(1,35)
MB	0,000	(0,04)
GROWTH	-0,012	(-0,59)
CEOAGE	0,001	(0,76)
CEOFOUNDER	-0,028	(-1,16)
CEOTENURE	0,00165	(1,17)
CEOGENDER	0,004	(0,16)

Variabel	Koefisien	t-statistik
FAGE	-0,000	(-0,24)
Konstanta	-0,187	(-1,43)
r ²	0.062	
Year Dummies	Include	Include
Industry Dummies	Include	Include
N	1409	

Sumber: data diolah (2026)

Keterangan: * $p < 0,1$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. Efek tetap industri dan tahun disertakan. Mengingat GAAP_ETR berhubungan terbalik dengan tingkat penghindaran pajak, koefisien negatif menunjukkan peningkatan *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa CSR memiliki koefisien -0,089 dan signifikan pada tingkat 5% ($t = -2,16$). Mengingat GAAP_ETR berhubungan terbalik dengan tingkat penghindaran pajak, arah negatif ini berarti semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, sehingga H1 diterima. Temuan ini sejalan dengan teori legitimasi. Dalam konteks ini, pengungkapan CSR tidak semata-mata digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, melainkan juga dimanfaatkan sebagai instrumen pembentuk reputasi atau “modal moral”. Reputasi positif yang terbangun memberikan cadangan legitimasi yang meredam tekanan publik, sehingga perusahaan merasa lebih leluasa melakukan penghindaran pajak tanpa risiko reputasi yang signifikan. Mekanisme ini konsisten dengan perspektif *insurance-like effect*, di mana aktivitas CSR berperan sebagai alat lindung nilai terhadap risiko reputasi akibat perilaku pajak agresif.

Temuan ini mendukung hasil Karavitis dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan CSR sebagai instrumen manajemen risiko untuk menutupi dampak negatif praktik pajak agresif, serta konsisten dengan Wulandari dan Fanani (2024) dan Retnoningsih dkk. (2024) yang menemukan korelasi positif antara CSR dan penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia sebagai strategi legitimasi.

Pengaruh CEO *Overconfidence* terhadap *Tax avoidance*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa OC memiliki koefisien -0,005 dan tidak signifikan ($t = -0,35$), sehingga CEO *overconfidence* tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan H2 ditolak. Temuan ini tidak sejalan dengan prediksi upper echelon theory yang menyatakannya bahwa karakteristik psikologis pemimpin puncak akan tercermin dalam keputusan strategis perusahaan. Terdapat dua penjelasan atas hasil ini. Pertama, sistem tata kelola dua tingkat (two-tier governance system) di

Indonesia menempatkan keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan, tidak sepenuhnya di tangan CEO secara individual, melainkan diambil secara kolektif oleh dewan direksi dan diawasi dewan komisaris, sehingga meredam bias psikologis CEO. Kedua, praktik penghindaran pajak agresif mengandung risiko audit, sanksi perpajakan, dan kerusakan reputasi, sehingga CEO *overconfidence* yang justru memiliki keyakinan tinggi terhadap citra perusahaannya cenderung menghindari tindakan yang ber-potensi menimbulkan benturan dengan otoritas pajak.

Temuan ini konsisten dengan Carrer dan Slavov (2021) yang juga tidak menemukan hubungan signifikan antara *overconfidence* CEO dan agresivitas pajak. Dengan demikian, dalam konteks perusahaan non-keuangan di BEI periode 2020 – 2024, karakteristik *over-confidence* CEO belum terbukti menjadi determinan yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan CEO *overconfidence* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024, dengan penghindaran pajak diproses melalui GAAP *effective tax rate* (GAAP_ETR) dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda (OLS) yang disertai robust standard error serta efek tetap industri dan tahun terhadap 1.409 observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien negatif terhadap GAAP_ETR (-0,089; $p < 0,05$), yang berarti semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, CEO *overconfidence* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dari dua hipotesis yang diajukan, hipotesis pertama (H1) diterima sementara hipotesis kedua (H2) ditolak.

Bila dikaitkan dengan tujuan penelitian, temuan ini memberikan sintesis yang jelas. Pengaruh positif pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak konsisten dengan teori legitimasi, di mana CSR tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial, melainkan juga dimanfaatkan sebagai "modal moral" atau instrumen lindung nilai reputasi (insurance-like effect) yang memberi perusahaan keleluasaan untuk melakukan penghindaran pajak tanpa menghadapi tekanan reputasi yang berarti. Sementara itu, tidak signifikannya CEO *overconfidence* menunjukkan bahwa prediksi upper echelon theory tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan oleh sistem tata kelola dua tingkat (two-tier governance system) yang menempatkan keputusan strategis secara kolektif pada dewan direksi dengan pengawasan dewan komisaris, sehingga bias psikologis individual CEO menjadi terbatas dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi mengenai determinan penghindaran pajak dengan menempatkan pengungkapan CSR dan karakteristik psikologis pemimpin puncak secara

bersamaan pada cakupan seluruh sektor non-keuangan, sehingga melengkapi studi sebelumnya yang umumnya terbatas pada sektor atau konteks negara tertentu. Secara praktis, hasil penelitian mengindikasikan perlunya kecermatan otoritas perpa-jakan dan regulator dalam mengawasi perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR tinggi, karena CSR berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi untuk meredam tekanan reputasi atas praktik penghindaran pajak. Bagi perusahaan, temuan ini mendorong agar pelaksanaan dan pengungkapan CSR benar-benar mencerminkan komitmen sosial yang substantif, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan bukan sekadar alat pembentuk citra. Bagi investor, praktik pengungkapan CSR dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai potensi risiko perpajakan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, CEO *overconfidence* hanya diukur menggunakan satu proksi tunggal berbasis belanja modal, sehingga belum menangkap dimensi *overconfidence* secara menyeluruh. Kedua, penghindaran pajak hanya diukur dengan satu proksi, yaitu GAAP_ETR, sehingga belum mencerminkan seluruh bentuk strategi penghindaran pajak. Ketiga, nilai R-squared yang relatif rendah menunjukkan masih banyak faktor lain di luar model yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Keempat, periode penelitian mencakup masa pandemi COVID-19 yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan perilaku fiskal perusahaan secara tidak biasa. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi CEO *overconfidence* yang lebih beragam (seperti pendekatan berbasis opsi saham, frekuensi akui-sisi, atau analisis nada laporan tahunan), menambahkan proksi *tax avoidance* lain seperti Cash *Effective tax rate* (CETR) atau Book-Tax Difference (BTD) sebagai uji ketahanan, serta mempertimbangkan variabel pemoderasi seperti karakteristik Komite Audit, kepemilikan institusional, atau koneksi politik guna menjelaskan lebih dalam mekanisme hubungan antara CSR, karakteristik CEO, dan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilyani, R., & Karina, R. (2024). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak dan Manajemen Laba. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index>
- Arliansyah, W., Khaddafi, M., & Zulkifli, A. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. JAM, 2(4). <https://doi.org/10.29103/jam.v%vi%i.11464>
- Brown, R., & Sarma, N. (2007). CEO *overconfidence*, CEO dominance and corporate acquisitions. *Journal of Economics and Business*, 59(5), 358–379. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2007.04.002>
- Carrer, G., & Slavov, T. (2021). Tax aggressiveness and CEO *overconfidence* in the stock market: Evidence from Brazil. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(1), 165–176. [https://doi.org/10.21511/imfi.18\(1\).2021.14](https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.14)

- Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of *Corporate Social Responsibility*: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1).
- Duellman, S., Hurwitz, H., & Sun, Y. (2015). Managerial *overconfidence* and audit fees. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 148–165. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.05.001>
- Hajawiyah, A., Kiswanto, K., Suryarini, T., Yanto, H., & Harjanto, A. P. (2022). The bidirectional relationship of tax aggressiveness and CSR: Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090207>
- Hidayatulloh, T., Tanzil, N. D., & Priyono, A. P. (2024). Digital Transformation, Media Attention, and *Tax avoidance*: A Study of Indonesian Multinationals. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 6(1), 231–243. <https://doi.org/10.35912/jakman.v6i1.3735>
- Hsieh, T.-S., Wang, Z., & Demirkan, S. (2018). *Overconfidence* and *Tax avoidance*: The Role of CEO and CFO Interaction. <http://ssrn.com/abstract=2843355>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). [Berita penahanan direksi PT Telekomunikasi Elektronik terkait dugaan tindak pidana perpajakan].
- Jakarta Dinsos. (2025). Komitmen Jalankan Program CSR, 10 Perusahaan Raih Penghargaan Padmamitra Awards 2024. <https://dinsos.jakarta.go.id/berita/komitmen-jalankan-program-csr-10-perusahaan-raih-penghargaan-padmamitra-awards-2024>
- Karavitis, P., Kazakis, P., & Xu, T. (2025). *Overconfidence* CEOs, *Corporate Social Responsibility*, and *tax avoidance*: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 59. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2025.100702>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). [Data tax ratio Indonesia periode 2020–2024].
- Kharisma Putri, D. N. (2026). The Effect of CEO *Overconfidence* on the Relationship Between *Corporate Social Responsibility* Disclosure and *Tax avoidance*: An Empirical Study on Public Listed Companies Consumer Goods Sector Non-Cyclical in Indonesia 2022–2024 [Skripsi, Universitas Lampung].
- Kovács, G. (2008). Corporate environmental responsibility in the supply chain. *Journal of Cleaner Production*, 16(15), 1571–1578. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.013>
- Kurnikova, A. A., & Sucahyati, D. (2026). The Influence of Political Connections on *Corporate Social Responsibility* Disclosure in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 10(2), 348–361. <https://doi.org/10.29303/jaa.v10i2.722>
- Listiani, N., Nugrahanti, Y. W., Damayanti, T. W., & Supramono, S. (2024). Managerial *Overconfidence*, Cash Flow, Tax Aggressiveness and Firm Value. *Montenegrin Journal of Economics*, 20(1), 47–57. <https://doi.org/10.14254/1800-5845/2024.20-1.5>
- Martina Gita Warastri, R., & Hari Suryaningrum, D. (2022). Pengaruh *tax avoidance*, tax reporting aggressiveness, dan tax risk terhadap risiko perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>

- Mayaningsih, A., Ismail, M., & Arizal, M. A. (2023). *Tax avoidance* Actions in Indonesia.
- Montenegro, T. M. (2021). Tax evasion, *Corporate Social Responsibility* and national governance: A country-level study. *Sustainability* (Switzerland), 13(20). <https://doi.org/10.3390/su132011166>
- Nerantzidis, M., Persakis, A., & Tzeremes, P. (2024). *Tax avoidance*, CSR performance and CEO characteristics: Evidence from developed and developing countries. *Development and Sustainability in Economics and Finance*, 2–4, 100021. <https://doi.org/10.1016/j.dsef.2024.100021>
- News Antara. (2025). BEI ungkap 873 perusahaan tercatat penuh laporan keberlanjutan. <https://www.antaranews.com/berita/4575678/bei-ungkap-873-perusahaan-tercatat-penuhi-laporan-keberlanjutan>
- Nurhaliza, F., & Widarjo, W. (2023). *Corporate Social Responsibility* and *Tax avoidance*: A Systematic Literature Review. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 07(07), 201–218. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2023.7715>
- Pratama, Burhanudin, & Kodriyah. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Perbankan Yang Teraftar Di BEI Tahun 2016–2021.
- Putri Fahira, F., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pengungkapan Corporate Governance dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Teraftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
- Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiah, M. (2024). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 8(2), 1367–1373. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2021>
- Rudiatun, R., & Hari Suryaningrum, D. (2023). The Effect of Ownership Structure and Audit Committee Characteristics on *Tax avoidance* with CSR as Intervening Variable. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Sharma, S., & Chatterjee, S. (2021). Winsorization for robust Bayesian neural networks. *Entropy*, 23(11). <https://doi.org/10.3390/e23111546>
- Souguir, Z., Lassoued, N., & Bouzgarrou, H. (2024). CEO *overconfidence* and *tax avoidance*: Role of institutional and family ownership. *International Journal of Managerial Finance*, 20(3), 768–793. <https://doi.org/10.1108/IJMF-12-2022-0545>
- Soysa, R. N. K., Pallegedara, A., Kumara, A. S., Jayasena, D. M., & Samaranayake, M. K. S. M. (2024). Construction of a sustainability reporting score index integrating sustainable development goals (SDGs): The case of Sri Lankan listed firms. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 31(3), 190–202. <https://doi.org/10.1108/JABES-05-2023-0149>
- Susilowati, E., Fadilah, A. K. W., Putri, S. Y., Andayani, S., & Kirana, N. W. I. (2024). Maximizing Firm Value: Analyzing Profitability and Leverage with *Tax avoidance* Interventions. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 7(1), 114–132. <https://doi.org/10.33005/jasf.v7i1.450>
- Sutrisno, P., Utama, S., Hermawan, A. A., & Fatima, E. (2022). Founder and Descendant vs. Professional CEO: Does CEO *Overconfidence* Affect *Tax avoidance* in the Indonesia Case?

Economies, 10(12). <https://doi.org/10.3390/economies10120327>

Wilmshurst, T. D., & Frost, G. R. (2000). Corporate environmental reporting: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(1), 10–26. <https://doi.org/10.1108/09513570010316126>

Wulandari, A., & Fanani, Z. (2024). *Corporate Social Responsibility (CSR) and Tax avoidance (TA) in Indonesia: Moderated Audit Committee Characteristics*. *Accounting Analysis Journal*, 13(2), 106–117. <https://doi.org/10.15294/aaj.v13i2.2586>

Zumariz, I., & Putri, S. Y. (2026). The Determinants of *Tax avoidance*: The Role of Return on Assets and Company Size in the Financial Sector in Indonesia. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 7(1), 27–38. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v7i1.2780>